

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yaitu kekuasaan atau keberdayaan.¹ Sehingga secara harfiah pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga, kekuatan, atau kekuasaan.² Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah usaha menjadikan keadaan manusia yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, regional, negara, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dll.³ Karenanya ide pertama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain menjadi apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat berubah.

Masyarakat (*society*) merupakan sekumpulan individu yang tinggal di wilayah tertentu dan membina kehidupan bersama. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat

¹ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 57-58.

² Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, *Corporate Social Responsibility Dipandang Dari Prespektif Komunikasi Organisasi*, (Yogyakarta: Ekuilibra, 2016), 84-85.

³ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia dari Desa*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016), 19.

istiadat tertentu yang bersifat *kontinue* dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁴

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pemberdayaan yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat. Menurut Sumodiningrat, mengatkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelomok yang saling berkaitan yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan kelompok yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan⁵.

Menurut Suharto dalam bukunya, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.⁶

Menurut Ife, pemberdayaan mengacu pada kata *empowerment* yang berarti membantu kelompok dengan sumber daya, pengetahuan, kesempatan, dan keahlian dalam meningkatkan kapasitas kelompok sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan kelompok.⁷

Menurut Rappaport 1984 dalam bukunya Suharto, pemberdayaan adalah suatu cara dengan dimana rakyat, organisasi, komunikasi diarahkan

⁴ Kontjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 116.

⁵ Hatu Rauf A, "Pemberdayaan & Pendampingan Dalam Masyarakat", (INOVASI, Volume 7, Nomer 4, Desember 2010), 243.

⁶ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, 59-60.

⁷ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 265.

agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya.

Berdasarkan pengertian teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau memperkuat kekuasaan pada kelompok lemah dalam masyarakat dengan memberi dorongan dan kesempatan peluang lewat perwujudan potensi yang mereka miliki sehingga dapat mencapai perubahan sosial kehidupannya.

Seorang pemberdaya membantu masyarakat dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan sebuah tindakan yang tepat, termasuk dalam pengurangan efek hambatan pribadi maupun sosial. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri masyarakat untuk menggunakan daya yang dimiliki.

Secara umum pengembangan masyarakat Islam adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakkan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Secara khusus pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

Menurut Ibnu Kaldun secara etomologi pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas. Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam yang meneliti hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemikiran sosiologis Ibnu Kaldun, bahwa manusia secara individu diberikan kelebihan namun secara kodrati manusia diberi kekurangan. Dengan kelebihanya perlu

dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun. Pengembangan masyarakat Islam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam prespektif Islam.⁸

Pemberdayaan masyarakat bukan hal yang asing lagi bagi kita, apalagi berkaitan dengan dakwah Islam. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam hal gotong royong, kerjasama, dan kebudayaan yang menjunjung toleransi untuk saling menghargai pendapat orang lain. Semangat pemberdayaan masyarakat saat ini adalah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dalam konteks transformasi sosial demi kesejahteraan sosial.

Dakwah Pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan aksi ketimbang hanya sebuah wacana. Aksi dakwah pemberdayaan masyarakat biasanya masuk dalam bidang sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, pendidikan, politik, pengembangan SDM dan sebagainya. Islam dihadirkan untuk dapat mengubah, mengembangkan, dan memberdayakan manusia dengan segenapnya potensi yang dimilikinya sebagai pengejawantahan wakil Allah dimuka bumi. Dipandang dari segi metode, paradigma dakwah pemberdayaan masyarakat berusaha mewujudkan Islam sebagai pijakan pemberdayaan dan perubahan sosial yang bersifat transformatif-emansipatoris.

Dakwah bil hal yaitu dakwah dengan aksi nyata. Dengan kata lain, dakwah bil hal merupakan metode pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memberdayakan aset yang dimiliki suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk kemudian dikembangkan sehingga masyarakat tersebut

⁸ Muhtadi Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 6-7.

memiliki daya dan kemampuan untuk bangkit dari keterbelakangan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan.

Dakwah bil hal secara mutlak harus dapat memahami kebutuhan sasaran dakwah. Seperti halnya berdakwah dikalangan masyarakat pedesaan yang sebagian warganya berada dibawah garis kemiskinan tidak akan efektif dengan hanya berceramah, namun akan lebih efektif bila dakwah dilakukan dengan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya, memberikan makanan, pakaian dan yang terpenting lagi dapat memberdayakan mereka agar memiliki daya untuk bangkit dari keterpurukan. Idealnya pengembangan dakwah yang efektif harus mengacu pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas keislamannya, sekaligus juga kualitas hidupnya. Dakwah terhadap masyarakat pedesaan diharapkan menumbuhkan etos kerja mereka. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh dakwah bil hal.

Kaitannya dengan pembangunan dan perubahan masyarakat maka dalam hal ini *da'i* menjadi *agen of change* karena *action* atau perilaku *da'i* akan ditiru oleh masyarakat. Sehingga dakwah bil hal merupakan upaya yang bersifat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah mereka dan lebih dari itu, setiap kegiatan dakwah yang dilakukan harus ada tindak lanjutnya secara berkesinambungan. Dalam hal ini, fasilitator pelaksanaan pembangunan sebagai pembuka pintu pembangunan yang akan memunculkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masyarakat, karena dakwah memiliki sifat *taghyir* atau perubahan yang muncul dari, oleh dan untuk masyarakat. Sebagaimana dalil dalam al-quran surat ar-ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali kali tak ada peindung bagi mereka selain Dia”.⁹

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa pemecahan masalah seseorang atau suatu kelompok orang akan sangat arif dan bermanfaat bagi mereka, jika mereka sendiri yang mencari pemecahannya. Orang lain *da'i* atau fasilitator hanya membantu bukan pelaku utama.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal.¹⁰ Adapun tujuan pemberdayaan atau pengembangan masyarakat secara garis besar dibedakan berdasarkan dimensi yang melatarbelakangi atau yang menjadi sudut pandang masing-masing penelaah yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

⁹ Alquran, Ar Ra'd ayat 11, Alquran dan terjemahnya, (Bandung: Departemen Agama RI, yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Penerbit Diponegoro 2005).

¹⁰ Kondisi internal merupakan kondisi yang berpengaruh dari diri mereka sendiri yaitu persepsi atau jalan pikir mereka sendiri yang tidak berdaya. Adapun kondisi eksternal merupakan kondisi kelompok lemah yang ditindas oleh sturktur sosial yang tidak adil sehingga mereka tidak memiliki keberdayaan.

Tujuan umum yaitu cenderung bersifat universal dan menyangkut kepentingan bersama masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas. Tujuan khusus yaitu bersifat spesifik dengan rentang waktu pencapaian lebih cepat dibanding tujuan umum.¹¹

Tujuan umum ditargetkan dapat terealisasi pada tahap akhir kegiatan pengembangan masyarakat. Upaya pencapaian tujuan umum merupakan tolak ukur dari keberhasilan keseluruhan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat. Tujuan khusus meliputi beberapa butir target yang direncanakan secara bertahap, perincian target sasaran lebih jelas dan terfokus sehingga mudah diukur tingkat keberhasilannya. Tujuan khusus menggambarkan kondisi pembaharuan yang diinginkan masyarakat yang dalam masalah untuk setiap kegiatan pendukung agar permasalahan dan kebutuhan teratasi secara bijak.

c. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

1) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

2) Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan

¹¹ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 35-36.

kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan dan pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.

3) Demokratis.

Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada masyarakat, mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Keberlanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan untuk saat ini dan masa yang akan datang untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum, pemberdayaan dilakukan dengan cara kolektif. Dimana terjadinya proses pemberdayaan pada relasi *one by one* antara pekerja sosial dengan klien dalam pengaturan pertolongan perseorangan. Pada berbagai kondisi, teknik pemberdayaan bisa dilaksanakan dengan cara individual, meskipun masih berkaitan dengan kolektivitas, maksudnya yaitu mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Hal ini pemberdayaan dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowering setting*) yaitu:¹²

- 1) Aras makro merupakan pendekatan yang sering disebut sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam

¹² Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, 66-67.

pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

- 2) Aras mezzo merupakan pelaksanaan pemberdayaan atas sekelompok klien pemberdayaan sebagai media intervensi. Pembelajaran dan pelatihan, dinamika kelompok biasa dipakai untuk strategi peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar mempunyai *skill* dalam pemecahan masalah yang di hadapinya.
- 3) Aras mikro merupakan pelaksanaan pemberdayaan pada klien secara individual dengan sebuah bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*, dengan tujuan melatih klien menjalankan tugas-tugasnya. model ini disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). Secara umum strategi pengembangan masyarakat terdiri dari empat strategi pada umumnya, yaitu:
 - a) *The growth strategy*, strategi pertumbuhan adalah bahwa untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas penduduk yang dibarengi kemampuan konsumsi masyarakat.
 - b) *The welfare strategy*, dimana kesejahteraan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.
 - c) *The responsive strategy*, dimana terjadinya reaksi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya guna mencapai kesejahteraan.

- d) *The intregated or holistic strategy*, adanya partisipasi masyarakat.¹³
- e. Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Dalam konteks pemberdayaan atau pengembangan masyarakat bahwa perencanaan yang dimaksud disebut dengan perencanaan sosial. Perencanaan sosial pada hakekatnya menunjukkan pada perencanaan mengenai program pelayanan kesejahteraan sosial. *Top down planning* merupakan perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh.

Secara garis besar perencanaan sosial dapat dirumuskan menjadi lima tahap yaitu 1) Identifikasi masalah 2) Penentuan tujuan 3) Penyusunan dan pengembangan rencana program 4) Pelaksanaan program dan 5) Evaluasi program.

- 2) Pelaksanaan

Tahap implementasi program menunjukkan pada perubahan proses

¹³ Moh. Ali Aziz, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : Lkis Printing Cemerlang, 2005), 8-9.

¹⁴ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, 71-72.

perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Ada dua prosedur dalam melaksanakan program yaitu 1) merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program 2) merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.

3) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan sejak awal kegiatan, terutama saat implementasi program. Tujuan monitoring yaitu untuk melihat atau mengawasi apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau terjadi penyimpangan agar dapat segera dilakukan perbaikan. Monitoring digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang tidak sesuai dari rencana serta mengupayakan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Evaluasi dapat dilakukan terhadap proses dan hasil implementasi program, dilakukan pada waktu tertentu dan pada akhir kegiatan. Tujuan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, faktor yang menghambat dan pendukung dan langkah yang perlu diambil untuk perbaikan lebih lanjut.

f. Metode Pemberdayaan Masyarakat

1) RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

Merupakan metode penilaian keadaan kondisi geografis dan sosial-ekonomi secara cepat. Kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh orang luar dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian-penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.

2) PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

PRA dilatarbelakangi oleh kritik para aktivis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terhadap penelitian dahulu yang lebih

banyak memposisikan masyarakat sekedar sebagai obyek penelitian. Metode partisipatoris merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden.¹⁵ Jadi PRA adalah teknik yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam membuat tindakan nyata rencana, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang berpengaruh pada kehidupannya. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses program, program itu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat kepedulian masyarakat dalam menjalankan program/kebijakan akan lebih tinggi.

2. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi partisipasi berasal dari kata *pars* yang berarti bagian atau mengambil bagian, dapat diartikan juga “peran serta” atau “keikutsertaan”. Secara istilah menurut Wazir (1999) bahwa partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Isbandi (2007) mengartikan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁶ Mulyadi mengartikan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan maupun melaksanakan suatu program yang mana masyarakat juga ikut serta merasakan manfaat dari program tersebut dan juga

¹⁵ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, 92.

¹⁶ Siti Hajar dkk, *Pembedayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), 30.

ikut terlibat dalam evaluasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Jim Ife mengatakan bahwa secara umum program pemerintah, partisipasi merupakan cara untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan dalam meningkatkan sistem efisiensi penyampaian serta sebagai upaya untuk menjamin meningkatkan peran masyarakat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.¹⁸ Berdasarkan pernyataan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dan sadar untuk berkontribusi dalam proses pembangunan dan pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Adapun tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diantaranya yaitu :¹⁹

- a. Berusaha untuk memberdayakan masyarakat dengan partisipasi dalam membangun masyarakat lebih berarti.
- b. Berusaha untuk peningkatan peran masyarakat dalam program pembangunan.
- c. Fokus dalam peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan program yang sudah ditetapkan sebagai tujuan program jangka panjang.

Menurut Henry Sanoff tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :²⁰

- 1) Untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi tertentu sebagai hasilnya, sehingga dapat menerima segala

¹⁷ M. Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, (Tangerang Selatan: Nadi Pustaka, 2009), 62.

¹⁸ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, 294-297.

¹⁹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development*, 294-297.

²⁰ Henry Sanoff, *Community Participation Methods in Design and Planning*, (New York: John Wiley & Sons L.td, 2000), 9.

keputusan dan rencana serta menjalankan dengan tanggung jawab.

- 2) Untuk memberikan kesempatan masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan agar dapat dilaksanakan secara baik.
- 3) Untuk meningkatkan rasa memiliki dengan orang-orang yang saling berbagi ide dan tujuan yang sama.

Menurut Eriscon (2001) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebuah program ada 3 tahap yaitu²¹ : Pertama, partisipasi tahap perencanaan adalah terlibatnya masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dan strategi pada suatu program. Dengan ini masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui musyawarah yang diadakan. Kedua, partisipasi tahap pelaksanaan adalah terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan suatu program. Pada tahap ini masyarakat berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, materi ataupun barang serta ide untuk terwujudnya suatu pekerjaan tersebut. Ketiga, partisipasi tahap pemanfaatan adalah terlibatnya masyarakat dalam suatu program setelah program dikerjakan. Dalam tahap ini masyarakat berpartisipasi berupa tenaga dan materi untuk pengelolaan proyek tersebut.

Menurut Cohen dan Uphoff tahap partisipasi masyarakat yang lebih nyata terjadi diantaranya yaitu²²: pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Dalam tahap ini masyarakat berpartisipasi dengan ikut serta hadir dalam rapat, memberikan usulan, memberikan

²¹ Wahyu Septiana, “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Bersih di Dukuh Juragan Desa Karangpatihan Kecamatan Puulung Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi: Institut Teknologi Sepuluh Noverber Surabaya, 2016). 21.

²² Moh. Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, 26.

informasi dan ikut serta dalam pengambilan keputusan pada pembangunan desa. Kedua, partisipasi dalam tahap pelaksanaan merupakan terlibatnya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa tenaga, materi, dan sebagai anggota proyek. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan merupakan hasil peran masyarakat dalam keikutsertaannya berpartisipasi dapat memberikan manfaat baik bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi dengan memelihara, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar secara sukarela. Keempat, partisipasi dalam tahap evaluasi merupakan terlibatnya masyarakat dalam mengawasi dan memberikan nilai pada hasil yang telah dilaksanakan. Keikutsertaan memberikan kritik, argument dan saran untuk disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan evaluasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berpartisipasi sebagai berikut:

- a) Dorojatun (Deviyanti, 2013) berpendapat bahwa terbangunnya partisipasi merupakan suatu tindakan, perwujudan perilaku didorong tiga faktor yaitu kemauan, sesuatu yang mendorong sikap untuk termotivasi dalam berpartisipasi. Kemampuan adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya mempunyai kemampuan berpartisipasi berupa pikiran, tenaga, waktu dan materi. Serta kesempatan yaitu kondisi lingkungan yang disadari bahwa seseorang mempunyai peluang berpartisipasi.
- b) Menurut Slamet (1993) faktor yang mempengaruhi partisipasi dilihat dari faktor internal yaitu :²³

²³ Wahyu Septiana, "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Bersih di Dukuh Jurugan Desa Karangpatihan Kecamatan Puulung Kabupaten Ponorogo", (Skripsi: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, 2016). 23-24.

- i. Jenis kelamin, pandangan masyarakat tentang perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban yang menyebabkan perbedaan partisipasi.
- ii. Usia, kelompok muda dan tua mempengaruhi tingkat partisipasi dalam memberikan pendapat dan pengambilan putusan.
- iii. Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan.
- iv. Tingkat pendapatan, besarnya tingkat penghasilan memberikan peluang lebih untuk berpartisipasi.
- v. Mata pencaharian, dapat dikatakan mata pencaharian dan jenis pekerjaan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.

Slamet (2003) mengemukakan bahwa faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri yaitu individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat oleh ciri-ciri sosiologis. Faktor internal dapat mendorong individu berpartisipasi dari dalam itu sendiri.²⁴ Secara teoritis ada hubungan antara ciri-ciri individu dengan partisipasi yaitu : usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, penghasilan serta terlibatnya kegiatan pembangunan yang berpengaruh pada partisipasi.

c) Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang memungkinkan adanya suatu dorongan kepada seseorang untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya. Sunaerti (2003) mengungkapkan bahwa faktor eksternal dapat dikatakan *stakeholder* yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh lebih

²⁴ Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2003), 97.

signifikan terhadap kesuksesan program kegiatan tersebut.²⁵ Dalam hal ini yaitu pemerintah desa, tokoh masyarakat dan fasilitator.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut KBBI kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang lebih baik.²⁶ Kesejahteraan diartikan sebagai kondisi yang sudah terpenuhi kebutuhan seseorang sesuai dengan standart yang berlaku di lingkungannya. Dalam perekonomian, kesejahteraan merupakan terbebasnya seorang dari kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mereka dapat ketentraman yang lebih aman dalam kehidupan. Midgley mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial sebagai *“a condition or state of human well-being”* kondisi sejahtera terjadi apabila kehidupan manusia terasa aman dan bahagia karena kebutuhan dasar gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan terpenuhi, serta apabila manusia memperoleh perlindungan dari risiko utama yang mengancam kehidupan.²⁷

Dalam UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat yang tujuannya agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.²⁸ Konsep kesejahteraan sosial adalah suatu institusi

²⁵ Sunarti, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok”, Jurnal Tata Kota, Volume 5, No.1, Januari 2003, 9.

²⁶ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Equilibrium, IAIN Kudus, Vol 3 No 2 (2015) : 383.

²⁷ Hari Harjanto Setiawan, “Mermuskan Indeks Kesejahteraan Social (IKS) Di Indonesia Defining Social Welfare Index (SWI) In Indonesia”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Sosio Informa Vol. 5 NO.3 (2019), 212.

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia, “Nomor 11 Tahun 2009, presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, (16 Januari 2009).

yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Definisi kesejahteraan sosial dari berbagai prespektif yaitu :²⁹

- a. Kesejahteraan sosial sebagai aktivitas atau sistem yang terorganisasi.
- b. Sebagai kondisi kehidupan yang sejahtera
- c. Sebagai disiplin ilmu.

Tujuan kesejahteraan (Zastrow) adalah “*the goal of social welfare is to fulfil the social, financial, health, and recreational requirement of all individuals in a society*”. Jadi tujuan kesejahteraan adalah memenuhi kebutuhan sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasi bagi individu dalam masyarakat.³⁰ Dalam bukunya Suharto menggunakan terminologi pembangunan kesejahteraan sosial yang berarti usaha yang terencana dan melembaga yang berbentuk intervensi sosial dan pelayanan social serta memperkuat institusi-institusi sosial. Dengan ini tujuan pembangunan kesejahteraan social adalah meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup :³¹

- 1) Peningkatan standart hidup, melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial untuk masyarakat terutama kelompok masyarakat yang rentang dan membutuhkan perlindungan social.
- 2) Peningkatan pemberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan

²⁹ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, 2.

³⁰ Hari Harjanto Setiawan, “Mermuskan Indeks Kesejahteraan Social (IKS) Di Indoesia Defining Social Welfare Index (SWI) In Indonesia”, 212-213.

³¹ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, 4.

politik yang mengangkat harga diri dan martabat kemanusiaan.

- 3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standart kemanusiaan.

Kesejahteraan dalam Islam yaitu sesuatu yang mengantarkan umat menuju kebahagiaan hidup, oleh sebab itu Islam memperhatikan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat. Islam megajarkan bahwa harta bukanlah indikator kesejahteraan, pada dasarnya harta hanyalah alat untuk digunakan beribadah kepada Allah SWT.³² Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan tujuan kekhalifahan yang dilakukan pada zaman dahulu. H.M. Quraish Sihab menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan dalam Al-qur'an tercermin surga yang dihuni oleh nabi adam dan siti hawa sesaat sebelum turun untuk melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Sebagaimana dalam dalil Al-qur'an surat Thaha ayat 117-119:³³

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى

Artinya : Maka kami berkata “ Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu mejadi celaka, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan seseungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.

³² Amirus Shodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Equilibrium, IAIN Kudus, Vol 3 NO.2 (2015), 338.

³³ Al Qur'an Ath Taha 117-119, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Departemen Agama RI, yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Penerbit Diponegoro, 2005).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kelaparan dan dahaga adalah kebutuhan pangan, telanjang adalah sandang, kepanasan artinya papan. Jadi, di surga telah tersedia segala kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan utama manusia. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur utama kesejahteraan sosial.

Indeks kesejahteraan menurut KBBI adalah rasio antara dua unsur bahasa yang mungkin menjadi suatu ciri tertentu. Yang dimaksud indeks kesejahteraan sosial adalah rasio antara dua unsur bahasa yang menjadi ukuran kesejahteraan social suatu negara. Indeks kesejahteraan sosial menjadi makna yang sangat tinggi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia karena yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan sejak tahun 1945 adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁴ Terkait pengukuran indeks kesejahteraan telah dilakukan. BPS setiap tahunnya juga memublish tentang indikator kesejahteraan rakyat. Publikasi tersebut mencakup delapan bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, kependidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan social lainnya yang menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Indeks kesejahteraan dapat diukur dengan melihat kondisi masyarakat, dalam mengukur indeks kesejahteraan harus mengintegrasikan kesejahteraan objektif dan subyektif karena kesejahteraan menyangkut perasaan seseorang. Dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut diharapkan lebih lengkap dan relevan. Adapun dimensi kesejahteraan mengacu OECD (*Organisation*

³⁴ Hari Harjanto Setiawan, "Mermuskan Indeks Kesejahteraan Social (IKS) Di Indoesia Defining Social Welfare Index (SWI) In Indonesia", 211.

Economic Co-Operation and Development) diantaranya yaitu :

- a) Kebutuhan Fisiologis, menurut Maslow merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar untuk hidup seperti sandang, pangan, makan, minum, tidur dll. Dengan ini kebutuhan dasar merupakan dimensi penting kesejahteraan. Ada tiga komponen yang termasuk kebutuhan fisiologis yaitu: penghasilan dan perumahan, kesehatan, hak dasar tentang kesehatan serta pendapatan.
- b) Keamanan dan Keselamatan, ada beberapa komponen yaitu keamanan fisik dan politik, keamanan ekonomi terkait pendidikan atau ketrampilan dan keamanan pekerjaan, serta lingkungan fisik.
- c) Kegiatan individu yang dihargai untuk otonomi dan kebebasan, pada komponen kegiatan produktif dan dihargai, dengan memberikan kontribusi otonomi dan kebebasan serta untuk kompetensi dan harga diri. Hal tersebut sangat penting untuk menangkap kepuasan keseluruhan dengan aktivitas utama.
- d) Keterkaitan - Milik, ada dua komponen yaitu:
 - Interaksi sosial, banyak bukti hubungan sosial dengan kesejahteraan. Seseorang dapat mengidentifikasi dua hal penting yaitu keintiman hubungan (dari mitra, keluarga, teman dan komunitas), dan sifat hubungan (dari yang memberi sampai yang menerima melalui saling hubungan). Dengan hal tersebut dapat disoroti melalui empat dimensi yaitu: mendukung hubungan, kegiatan dengan orang, kegiatan untuk orang dan modal sosial yang lebih luas (kohesi, kepemilikan dan kepercayaan).
 - Hak-hak dasar ditingkat sosial, hak suara dan partisipasi dan undang-undang anti diskriminasi merupakan hak-hak dasar tingkat sosial. Pada prinsipnya, hak-hak dasar dijamin oleh hukum dan perbedaan antar negara terletak faktual implementasi hukum dan strategi dari pada hak-

hak tertulis. Akibatnya, akan banyak informasi untuk kesejahteraan disediakan dengan menilai apakah sistem atau struktur hukum itu ada dalam menjamin hak-hak dasar yang diterima. Oleh karena itu, orang dapat memilih untuk mengganti nama komponen sebagai peluang yang sama (untuk gender/agama/budaya).

e) Kompetensi dan harga diri, komponen ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis akan kompetensi-personal efektivitas (masalah yang berfungsi) serta perasaan makna atau tujuan hidup. Hal ini juga terkait dengan harga diri. Salah satu faktor penentu kompetensi adalah pekerjaan dan kegiatan lainnya yang menyaratkan harus memasukkan indikator kerja. Pekerjaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan set indikator terbaik untuk serangkaian konsep ini.

4. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

Pamsimas merupakan salah satu program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan masyarakat pedesaan dan pinggiran kota yang belum layak mendapatkan fasilitas air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, guna tercapainya target MDGs (*Millenium Development Goals*). Tujuan umum pamsimas adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan dan pinggiran kota serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan menyediakan sarana prasarana yang dapat diadaptasi masyarakat dan berkelanjutan.

Ruang lingkup komponen program pamsimas yaitu :

- a. Pemberdayaan masyarakat dan pelebagaan lokal.
- b. Peningkatan kesehatan dan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
- c. Penyediaan air minum dan sanitasi umum.
- d. Hibah pengembangan sosial ekonomi lokal.
- e. Dukungan pelaksanaan dan manajemen proyek.

Program ini dijalankan mulai sejak tahun 2008-2012 telah dapat meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat di sejumlah 5200 desa yang berada pada 110 kabupaten/kota di 15 provinsi. Dilanjutkan lagi pada tahun 2013-2015 dapat meningkatkan warga masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan nilai perilaku hidup bersih dan sehat di sejumlah 6800 desa yang berada di 233 kabupaten/kota di 32 provinsi. Program pamsimas periode II tersebut guna meningkatkan akses penduduk yang berada di wilayah pedesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dalam pencapaian target tujuan *Millenium Development Goals*. Program pamsimas periode III dilaksanakan guna mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan penduduk terhadap pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan yaitu akses air minum yang layak serta bersih dan akses sanitasi total berbasis masyarakat. Periode ini dilaksanakan pada tahun 2016-2020 ditargetkan di sejumlah 27000 desa di 396 kabupaten di 11 kabupaten/kota.³⁵

Sasaran dari program pamsimas yaitu : tambahan akses air minum bagi 22.1 juta jiwa, tambahan akses sanitasi layak bagi 14.9 juta jiwa, minimal 60% masyarakat desa sasaran mengadopsi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS), 70% masyarakat desa mengadopsi program cuci tangan pakai sabun, 70% pemerintah daerah memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi, pemerintah daerah mempunyai peningkatan belanja dibidang air minum dan sanitasi. Kriteria

³⁵ “Profil PAMSIMAS” diakses pada tanggal 7 Juli 2020. <http://pamsimas.org/profil/ringkas-program/>.

umum masyarakat yang dapat fasilitas pamsimas yaitu : cakupan air minum dan sanitasi layak belum mencapai 100%, masih terbiasa buang air besar sembarangan, dan prevelensi penyakit diare (penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi menurut data puskesmas.

Program pamsimas tentunya melibatkan masyarakat, dimana masyarakat adalah peserta program berperan sebagai pelaku utama dalam seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Prinsip pelaksanaan program pamsimas yaitu:

- 1) Berbasis masyarakat. Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pamsimas menyertakan partisipatif masyarakat, baik perempuan laki-laki, kaya-miskin, hal tersebut atas dasar sebagai kebutuhan masyarakat sehingga terbangun dan dikelola oleh masyarakat.
 - 2) Partisipatif. Masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Tanggap kebutuhan. Penyelenggaraan pamsimas sesuai kebutuhan masyarakat.
 - 4) Tepat mutu. Fasilitas yang dibangun memenuhi standart yang ditetapkan dan menggunakan bahan yang berkualitas sehingga terbangun bangunan yang berkualitas.
 - 5) Keberpihakan pada masyarakat miskin. Kegiatan pamsimas memberikan manfaat bagi masyarakat miskin.
 - 6) Kesetaraan gender. Pamsimas memberikan kesempatan pada perempuan seperti halnya laki-laki untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pamsimas.
 - 7) Dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan pamsimas harus dapat dipertanggungjawabkan tepat sasaran, waktu, pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan.
5. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Pembangunan desa tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sangatlah penting karena masyarakatlah yang tahu kondisi permasalahan yang ada dilingkungannya. Kontribusi masyarakat dalam program pembangunan baik secara materi maupun tenaga membawa pengaruh keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau memperkuat kekuasaan pada kelompok lemah dalam masyarakat dengan memberikan dorongan dan kesempatan lewat perwujudan potensi yang dimiliki sehingga dapat mencapai perubahan sosial.

Dengan ini partisipasi masyarakat menjadi aspek utama dalam pemberdayaan masyarakat untuk terlaksananya program pamsimas. Dengan partisipasi masyarakat diharapkan mampu menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan dan pengelolaan program dari awal sampai keberlanjutan. Dengan menjadi pelaku utama, masyarakat dapat menganalisa apa yang dibutuhkan dan dapat memenuhinya secara keberlanjutan sehingga tercapainya pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pembangunan masyarakat desa adalah tercapainya target dari tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan melibatkan masyarakat. Realisasi target yang dimaksud berupa terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana fisik desa maupun pembangunan yang bersifat non fisik.

Tercapainya target MDGs melalui program pamsimas untuk masyarakat pedesaan dan pinggiran kota yang belum mempunyai akses air bersih dan sanitasi yang layak. Disisi lain, program pamsimas merupakan salah satu strategi penurunan angka kemiskinan disetiap kabupaten yang berada dibawah angka rata-rata nasional. Terlaksananya program pamsimas tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Salah satu komponen dalam pengelolaan pamsimas yaitu pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memampukan masyarakat untuk mengorganisasi dirinya merencanakan, mengelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman, memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam menjamin kualitas pengelolaan dan membangun komitmen dari pemerintah desa dan daerah dalam meningkatkan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air mium dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan melalui kebijakan pembangunan pamsimas.

Pemberdayaan masyarakat dalam tugas dan fungsi mitra yang terlibat program pamsimas dapat dipahami sebagai berikut :³⁶

- a. Badan perencanaan dan pembangunan nasional bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi terhadap perencanaan yang dilakukan oleh sektor terkait.
- b. Departemen pekerjaan umum direktur jenderal cipta karya ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek pamsimas secara teknis keseluruhan dan melakukan pembinaan yang berkaitan dengan konstruksi sarana yang dibangun.
- c. Departemen kesehatan direktur jenderal pemberatasan penyakit dan penyehatan lingkungan melakukan pembinaan teknis dalam program pengawasan kualitas air dan lingkungan sekitar serta penyuluhan kesehatan.
- d. Departemen dalam negeri direktur jenderal pengembangan daerah bertanggung jawab pembinaan koordnasi pelaksanaan di daerah dan direktur jenderal pengembangan masyarakat dan desa bertanggung jawab dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat.

³⁶ Jazmi Mordani, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PAMSIMAS di desa Kampung Panjang kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar”, (Skripsi, Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

- e. Departemen keuangan direktur jenderal anggaran bertanggung jawab dalam pembinaan kebijakan penganggaran dana pinjaman, dana hibah dan dana pendamping.

Komponen pemberdayaan masyarakat dalam program pamsimas merupakan proses partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pamsimas dengan berkontribusi melalui musyawarah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan ini memudahkan masyarakat dapat menikmati fasilitas akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat kurang mampu.

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal dari Andi Muhammad Afif yang berjudul, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sanitasi berbasis masyarakat di desa Blimbing kecamatan Boja kabupaten Kendal.³⁷ Tujuan penelitian tersebut yaitu mendeskripsikan partisipasi masyarakat dan dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat banyak masyarakat yang terlibat dalam setiap proses tahapan partisipasi. Dari tahapan pengambilan keputusan, masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui rapat atau musyawarah di tingkat desa dan kelompok masyarakat maupun rencana pembangunan jangka menengah desa. Sesuai tipologi partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yang sesuai yaitu tipologi interaktif dalam hal ini masyarakat memiliki andil besar dalam seluruh proses kegiatan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, sampai evaluasi.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Chika Chaerunnissa yang berjudul partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten Brebes (studi kasus desa lengok

³⁷ Muhammad Afif, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di desa Blimbing kecamatan Boja kabupaten Kendal", (Skripsi, Universitas Negri Walisogo, 2019).

dan desa tambakserang kecamatan bantarkawung).³⁸ Penelitian tersebut bertujuan mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan faktor-faktor partisipasi masyarakat dalam program pamsimas. Hasil penelitian dalam penelitian ini bentuk partisipasi masyarakat yaitu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Masyarakat desa legok berpartisipasi berupa sumbangan pikiran berupa memberikan usul, saran dan kritik. Sedangkan desa tambakserang berupa uang dan tenaga. Kondisi pembangunan tergantung pada bentuk partisipasi masyarakat yang merupakan peran utama dalam pembangunan. Adapun faktor-faktor dari partisipasi yaitu faktor internal seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pengetahuan. Faktor eksternal yaitu masyarakat dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa maupun daerah, mendapatkan kemudahan akses informasi berupa data, inovasi dan pembelajaran, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas menyusun proposal dan pengelolaan sarana yang baik.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Sulthan Ahmad, yang berjudul partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih di desa Malino kecamatan Balaesang kabupaten Donggala.³⁹ Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam partisipasi. Hasil penelitian ini yaitu bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga kerja dan material lokal yang sangat diharapkan dari pembangunan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu juga masyarakat iut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi yaitu masyarakat dapat mengambil peran disetiap tahapan kegiatan dan masyarakat mendapatkan manfaat dari

³⁸ Chika Chaerunnisa, "partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten Brebes (studi kasus desa lengok dan desa tambakserang kecamatan bantarkawung)", (Jurnal, *Politika* Vol 5 No. 2 Oktober 2014).

³⁹ Sultan Ahmad, "partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih di desa Malino kecamatan Balaesang kabupaten Donggala", (Jurnal, *Katalogis Volume 1 Nomor 1 Januari 2013*).

kegiatan tersebut. Adapun factor penghambatnya yaitu kurangnya sarana prasarana yang lebih luas serta belum ada kebijakan perdes dari pemerintah desa terkait pengelolaan sarana air bersih.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ibrahim Surotinojo, yang berjudul partisipasi masyarakat dalam program sanitasi berbasis masyarakat di desa Bajo kecamatan Tilamuta kabupaten boalemo Gorontalo.⁴⁰ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam program sanitasi di desa Bajo. Hasil penelitian ini bahwa bentuk partisipasi masyarakat bajo sangat baik dengan dibuktikannya berupa tenaga, pikiran/ide, material pada tahap perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu jenis pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Selain itu juga pemerintah dan tokoh masyarakat serta fasilitator yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Asminar yang berjudul partisipasi dan swadaya masyarakat dalam rangka menyukseskan pamsimas III di kabupaten Bungo provinsi Jambi.⁴¹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat serta tingkat aksesibilitas program pamsimas III di kabupaten bungo. Hasil penelitian mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terlihat dalam terlibatnya semua tahapan partisipasi mulai dari seleksi desa dengan penusunan proposal, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan berkelanjutan. Tingkatnya swadaya masyarakat bertujuan agar masyarakat merasa saling memiliki terhadap sarana yang telah dibangun.

⁴⁰ Ibrahim Surotinojo, "partisipasi masyarakat dalam program sanitasi berbasis masyarakat di desa Bajo kecamatan Tilamuta kabupaten boalemo Gorontalo", (Skripsi, Universitas Diponegoro 2009).

⁴¹ Asminar, "partisipasi dan swadaya masyarakat dalam rangka menyukseskan pamsimas III di kabupaten Bungo provinsi Jambi", (Jurnal, Regional and Rural Development Planning Februari 2019).

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dalam program sanitasi dan air bersih berbasis masyarakat. Penelitian ini persamaannya merujuk kepada jurnal yang disusun oleh Chika Chaerunnissa yang membahas tentang bentuk partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu pertama, skripsi dari Muhammad Afif membahas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pamsimas dengan mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pamsimas. Kedua, dari jurnal Sultan Ahmad yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih. Adapun yang diteliti sebenarnya hampir sama dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang bentuk partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, hanya saja dalam penelitian Sultan Ahmad membahas tentang sarana air bersih bukan pamsimas. Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ibrahim Sutonijo yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam program sanitasi berbasis masyarakat. Adapun yang diteliti yaitu tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang sanitasi berbasis masyarakat bukan pamsimas. Keempat, jurnal yang ditulis oleh Asminar membahas tentang partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat dalam rangka menyukseskan program pamsimas III di Jambi. Adapun yang diteliti yaitu tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat serta tingkat aksesibilitas dalam menyukseskan program pamsimas. Sedangkan yang diteliti penulis yaitu bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan upaya masyarakat dalam program pamsimas.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah serta memperhatikan dari teori dan konsep yang

menjadi pendukung penelitian, maka dapat dijelaskan lebih dalam bentuk kerangka berpikir yang menggambarkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam program pamsimas untuk kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Adapun kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

